

**SUBORDINASI PEREMPUAN DALAM  
ORGANISASI MAHASISWA  
IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2015**

**Ni'matun Naharin**

*Forum Perempuan Filsafat  
naharin.naba345@gmail.com*

**Abstract**

*Women as human entities are often defined by culture. Culture has even really made women the second marginalized human being. In the context of daily life, women often get discriminatory treatment. This treatment is then perpetuated inherited in the wider community. Even a woman is considered unfit to be a leader. As our culture and society then assure it. We can call this treatment a form of massive subordination. Subordination is a form of treatment that places women in the position of subordinates. Here then women are only considered servants, servants, supplements even merely pemuas of other entities named men. In its development then women who began to get a place in the community thanks to the massive movement of women is feminist. But not all women get a decent position to compete with men. There are always long spaces that then separate these two cultural entities and practice subordination and marginalization of women. Sebygg need to be made proving the hypothesis that in the study of feminism that has been increasingly massively voiced women are still in ketertindasannya. Even women themselves do not realize if he is in subordinated crisis and tend to enjoy.*

**Keywords:** *Woman, Subordination, College*

## A. PENDAHULUAN

Perempuan yang menjadi manusia kedua merasa perlu membentuk koalisi dalam rangka mewujudkan dirinya sebagai manusia unggul dan tidak kalah dari laki-laki. Perempuan memiliki peran ganda dimana dirinya masuk dalam ranah domestik, ekonomi. Sejalan dengan hal ini kemudian perempuan membuat kesadaran diri untuk bisa ikut terjun dalam ranah publik. Perempuan berupaya menyuarkan ketertindasan mereka melalui organisasi-organisasi yang kemudian dibentuk.

Dalam masyarakat telah terbentuk pembedaan baik sifat, fungsi maupun peran gender. Perempuan dan laki-laki mulai dibedakan kiprahnya baik dalam ruang publik maupun privat. Laki-laki digambarkan mempunyai sifat yang maskulin sementara perempuan dianggap feminin. Perempuan sekedar pelaku kerja domestik dan laki-laki publik. Dan yang paling remeh laki-laki dianggap pemberi nafkah utama sementara perempuan adalah nafkah tambahan.

Konsep gender sebenarnya telah disebarluaskan dalam masyarakat dan diartikan sebagaimana demikian. Bahwa seks itu merupakan perbedaan organ biologis antara laki-laki dan perempuan terkhusus bagian reproduksi. Dan seks itu bersifat kodrati, ciptaan Tuhan, tidak dapat diubah, berlaku dimana saja, dan tidak dapat ditukar. Sedangkan gender ialah pembagian peran, fungsi dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial. Sebagaimana dijelaskan Anker dan Hein ada yang namanya teori *nurture* yaitu bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tercipta melalui proses belajar dari lingkungan.<sup>1</sup>

Kerja keras perempuan untuk bisa ikut memenuhi kursi demokrasi sekaligus menduduki jabatan membuahkan hasil. Muncullah konsep emansipasi pada kurun waktu 1950-1960 yang mana kemudian 12 Juli 1963 Economic and Social Council PBB mengeluarkan resolusi 861 untuk gerakan global kaum perempuan. Selanjutnya tahun 1975 World

<sup>1</sup>Jeiske Salaa, "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud". *Jurnal Holistik*, Vol. VIII, No. 15 Januari-Juni 2015. Hal. 2.

Conference International Year of Woman yang diadakan di Kota Meksiko menghasilkan beberapa deklarasi kesetaraan. Isi dari deklarasi kesetaraan itu diantaranya ialah a). Pendidikan dan pekerjaan, b). Prioritas pembangunan bagi perempuan, c). Perluasan peran serta dalam pembangunan, d). Tersedia data dan informasi peran serta perempuan. Kemudian tahun 1980 diadakan konferensi dunia di Kopenhagen yang menghasilkan konvensi mengenai peniadaan seluruh bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau Committee on the Elimination of Discrimination Against Woman (CEDAW).<sup>2</sup>

Setelah terbentuknya CEDAW kemudian ada istilah baru yang mengawal isu gender dan kesetaraan. *Gender Mainstreaming* merupakan istilah yang diusulkan dalam pertemuan di Beijing pada tahun 1995 kemudian disepakati semua negara peserta kongres untuk menjadikan platform dan strategi dasar kebijakan pembangunan. Inilah sebagai pemantik banyak negara agar menyuarakan kesetaraan gender terutama menghapuskan diskriminasi perempuan.<sup>3</sup>

Menyusul kemudian isu gender yang mulai masuk ke Indonesia dengan tertatih-tatih harus ikut menuai emansipasi perempuan. Sebenarnya emansipasi ini bisa kita lihat sebelum Indonesia merdeka dimana banyak pula pahlawan perempuan yang ikut turun ke medan perang seperti, Christina Marta Tiahahu, Cut Nyak Dien, Cut Meutia dll. Setelah masa perjuangan ini kemudian kongres Perempuan di Indonesia diadakan pada 22 Desember 1928. Baru setelah kemerdekaan posisi perempuan mulai disejajarkan yaitu dengan diangkatnya Maria Ulfah Santoso sebagai Menteri Sosial pada kabinet Syahrir II. Inilah perjalanan gender dengan konsep pengarusutamaannya di Indonesia yang kemudian diabadikan dalam undang-undangnya.

---

<sup>2</sup> Tim PSG STAIN Pekalongan, "Perempuan dan Produk Hukum yang Menjamin Keadilan dan Kesetaraan Gender". *Jurnal Muzakah*, Vol. 2, No. 2. Desember 2010. Hal. 302.

<sup>3</sup> *Ibid.*. Hal. 303.

**Ni'matun Naharin:** *Subordinasi Perempuan.....*

Inpres Nomor 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional merupakan sebuah strategi pembangunan. Hal ini dilakukan dengan cara pengintegrasian pengalaman, aspirasi kebutuhan perempuan, aspirasi kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan. Implementasi untuk bisa menguatkan konsep gender ini dilakukan di dalam semua sektor kebijakan pembangunan nasional yang lebih dikenal dengan Gender and Development.<sup>4</sup>

Dalam ranah pendidikan kemudian perempuan diperbolehkan masuk dalam organisasi-organisasi kampus untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Misalnya perempuan ikut dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ataupun himpunan mahasiswa jurusan. Sehingga sejak awal perempuan telah mengenal bentuk birokrasi sejak dalam dunia pendidikan. Birokrasi merupakan bentuk organisasi yang paling rasional dengan karakteristik, sistem kewenangan yang hierarkis, pembagian kerja yang sistematis, kontrol operasi dengan aturan yang konsisten.

Meskipun demikian ada beberapa hal yang menghambat konsep kesetaraan gender ini. Sehingga masih banyak terjadi bias di dalam masyarakat yang membuat dekadensi berpikir pula. Diantaranya ialah status perempuan yang masih jadi manusia nomor dua misalnya daam hal adat, agama, bahkan patriarkhis. Stereotip gender yang ternyata semakin melemahkan perempuan, serta peran biologi perempuan yang amat menyita waktu.

## **B. PEMBAHASAN**

Beberapa dekade terakhir upaya pengarusutamaan gender ini menjadi diskursus pada kalangan aktivis khususnya perempuan. Bahkan dalam keluarga, lingkungan masyarakat, pendidikan, mauun politisi. Sebenarnya telah banyak strategi yang ditawarkan demi terwujudnya kesetaraan gender terutama dalam dunia pendidikan yang mencetak

---

<sup>4</sup> *Ibid.*. Hal. 305.

banyak aktivis. Mengingat permasalahan gender ini belum benar-benar klar baik dalam organisasi maupun dunia pendidikan. Sehingga penulis merasa perlu mengkaji bagaimana peran perempuan dalam organisasi kampus. Penulis juga ingin membuktikan hipotesa awalnya bahwa perempuan era milenial ini meskipun telah bebas mengikuti organisasi namun masih tersubordinasi.

### *Memaknai Gender*

Gender merupakan konsep yang merujuk pada sistem peranan dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bisa ditentukan oleh perbedaan biologis, namun oleh lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Selain itu menurut WHO gender ialah seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap sesuai bagi laki-laki dan perempuan yang memang sudah dikonstruksi dalam lingkungan sosial masyarakat.<sup>5</sup>

Sementara itu istilah gender sebenarnya berasal dari bahasa Inggris *gender* yang pertama kali dikenalkan oleh Robert Stoller. Robert membuat pemisahan ciri laki-laki dan perempuan didasarkan pada definisi sosial budaya dengan definisi fisik yang kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana Robert, Oakley membuat definisi gender yang merupakan buah dari konstruksi sosial atau atribut yang kemudian digunakan manusia dan peradabannya.<sup>6</sup>

Mansour Fakih mengungkapkan arti gender ialah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan itu nantinya akan dikenal lemah, cantik, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, jantan, rasional, dan perkasa. Sehingga seks itu bersifat kodrati dan gender bersifat non kodrati.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Ditaria, "Analisis Gender Peran Kepemimpinan Perempuan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tahun 2016". Hal. 5.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Abdul Karim. "kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan)". *Jurnal Fikrah*. Vol. 2, No. 1 Juni 2014.

Gender juga merupakan kata yang sebenarnya sudah terbelang lama, namun dalam era sekarang gender mendapatkan makna baru. Lebih lanjut gender itu diberi makna jenis kelamin, tapi terkadang terdapat kerancuan dan seringkali di senggol dengan seks. Padahal seks itu lebih mengacu kepada kebutuhan biologis, misalnya kromosom, hormon, fisik laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender itu lebih mengarah kepada identitas sosial yang biasanya menggambarkan peranan sosial seseorang berdasar jenis kelamin mereka di masyarakat. Hal ini merupakan konstruksi sosial maupun kultural yang sangat diamini banyak orang. Jika seks itu digambarkan sebagai kebutuhan biologis maka gender merupakan praktik daripada seseorang di dalam kehidupannya. Jadi gender itu sebagai pembeda antara bentuk nyata dan jenis kelamin yang kemudian membentuk dua kategori maskulin dan feminim.<sup>8</sup>

Sebenarnya munculnya gender ini juga menjadikan dikotomi bagi manusia sendiri. Sebab pembedaan ini menyebabkan timbulnya ketidakadilan gender di berbagai lini kehidupan, dibentuk, disosialisasikan, bahkan diperkuat dengan konstruksi sosial, budaya. Apalagi agamapun turut andil dalam mengonstruksi keberadaan gender ini sehingga melalui proses yang panjang ini seolah-olah konstruksi tadi menjadi titah Tuhan yang harus ditaati. Sehingga sesiapapun menjadi menganggap konstruksi sosial itu tidak bisa diubah seolah bersifat biologis.<sup>9</sup>

Secara umum dipahami bahwa kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh keadilan hak sebagai manusia. Hal ini bertujuan untuk mengatur peran masing-masing manusia dalam kegiatan politik, ekonomi, hukum sosial budaya, pendidikan bahkan keamanan nasional. Kesetaraan ini juga meliputi dihapuskannya diskriminasi dan ketidakadilan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketaraan gender merupakan

---

<sup>8</sup> Supartinah, "Partisipasi Perempuan dalam struktur Organisasi Desa (Study Kasus Desa Pakelen, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Dimensia*, Vol. 4, No. 2, September 2010. Hal. 85.

<sup>9</sup> *Ibid.*

kesetaraan hak dan derajat bagi kaum perempuan. Beberapa gerakan perempuan memelopori kesetaraan gender ini diantaranya ialah feminisme yang meliputi Feminisme Liberal, Feminisme Radikal, Feminisme Marxis dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Kemudian ada lagi istilah analisis gender yang merupakan metode untuk mendeteksi besarnya kesenjangan gender melalui data dan fakta tentang gender. Data ini meliputi data terpisah antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan misalnya akses, peran, serta manfaat. Maka analisis gender merupakan suatu proses menganalisis data serta informasi dengan cara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk identifikasi kedudukan, peran, fungsi, serta tanggungjawab laki-laki dan perempuan. Ada syarat utama yang harus dipenuhi agar analisis gender ini dapat terpenuhi yaitu tersedianya data yang sudah terpilah dengan dasar jenis kelamin.<sup>11</sup>

Data ini kemudian diubah menjadi semacam nilai dan variabel yang sudah dipilah tadi antara laki-laki dan perempuan berdasar topik yang sudah ditentukan sebelumnya. Data ini terdiri atas kuantitatif dimana nilai atas variabel diukur berdasar numerik atau angka. Kemudian data kualitatif dimana data ini diukur dengan nilai variabel yang tidak bisa diukur dengan angka melainkan informasi-informasi.<sup>12</sup>

Masyarakat sebagai salah satu komponen yang harus berpartisipasi aktif dalam organisasi. Cokrowinoto mengemukakan bahwa partisipasi merupakan proses bertemunya intelektual dan emosional dalam sebuah organisasi untuk pengambilan keputusan. Keith Davis membagi partisipasi menjadi beberapa bagian yaitu, a). Partisipasi tenaga, b). Partisipasi pikiran, c). Partisipasi tenaga dan pikiran, d). Partisipasi barang, e). Partisipasi keahlian dan f). Partisipasi uang. Kemudian hal berbeda juga disampaikan Taliziduhu Ndraha mengenai partisipasi yang mana dibagi menjadi

---

<sup>10</sup> *Ibid.*. Hal. 86.

<sup>11</sup> Ditaria, "Analisis Gender Peran Kepemimpinan Perempuan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tahun 2016". Hal. 5.

<sup>12</sup> *Ibid.*. hal. 6.

**Ni'matun Naharin:** *Subordinasi Perempuan.....*

beberapa jenis. Diantaranya yaitu, a). Partisipasi menerima dan memberi informasi, b). Partisipasi memberi tanggapan dan saran, c). Partisipasi pelaksanaan pembangunan, d). Partisipasi menerima pembangunan.<sup>13</sup>

Selama ini masih sedikit sekali partisipasi perempuan dalam organisasi apalagi berhubungan dengan pengambilan keputusan. Keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga sangat diperlukan demi merubuhkan budaya patriarki. Namun sampai detik ini kesempatan perempuan untuk menduduki posisi penting ataupun ketua organisasi masih saja dibatasi oleh budaya, masyarakat bahkan undang-undang sekalipun. Keith Davis dalam buku Naning Margasari mengemukakan bahwa partisipasi itu sudah seharusnya melibatkan mental dan emosional. Sehingga dengan demikian kelompok mempunyai tanggungjawab untuk saling mempererat persatuan dan kesatuannya.<sup>14</sup>

Sehingga sudah seharusnya perempuan mulai menata kembali konstruksi sosial yang menganggapnya bermental emosional yang tidak cakap dalam mengambil keputusan. Apalagi perempuan selama ini hanya bekerja pada ruang domestik sehingga memang perlu kesadaran yang masif dalam diri semua perempuan jika ingin diri mereka lebih maju dan bisa bersaing dengan laki-laki. Demikian kesetaraan gender akan bisa terwujud dalam lini kehidupan, dengan catatan konsep ini tidak hanya dijalankan oleh perempuan saja melainkan dengan dukungan laki-laki.

### *Makna Peran dan Peran Ganda Perempuan*

setelah kita mengetahui bagaimana makna gender dalam masyarakat dimana terkadang masih terdapat bias. Maka kita akan berjalan menuju apa yang dimaksud peran dalam masyarakat. Kozier Barbara mengemukakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap orang yang mempunyai kedudukan dalam sebuah

---

<sup>13</sup> Supartinah, "Partisipasi Perempuan dalam struktur Organisasi Desa (Study Kasus Desa Pakelen, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Dimensia*, Vol. 4, No. 2, September 2010. Hal. 87.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 88.



sistem. Sedangkan peran ini dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun luar yang bersifat biasanya bersifat stabil.<sup>15</sup>

Dalam sebuah organisasi peran dapat diartikan sebagai komponen dari suatu sistem sosial dalam organisasi tersebut. Selain itu peran ini juga menempatkan norma dan budaya dalam suatu organisasi. Ada beberapa aspek yang penting terkait dengan peran, yaitu:

- 1) Peran itu bisa impersonal, peran ini menentukan harapan dari seorang individu bukan sebaliknya.
- 2) Peran amat terikat dengan perilaku dalam bekerja, perilaku ini sangat diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
- 3) Peran merupakan komponen yang terkadang sulit untuk dikendalikan.
- 4) Peran dapat dipelajari asalkan individu ini mau mengubah perilakunya
- 5) Terdapat perbedaan antara peran dan pekerjaan, dimana seseorang yang sedang melakukan pekerjaan bisa memerankan beberapa peran.<sup>16</sup>

Sedangkan secara lebih umum peran ganda perempuan ini diartikan sebagai dua peran yang harus dimainkan oleh perempuan dalam waktu bersamaan. Adapun peran itu meliputi domestik, sebagai ibu rumah tangga, dan peran publik yang umumnya dalam pasar tenaga kerja. Sehingga dengan konsep ini perempuan tidak selalu terikat dengan kerja domestik. Perempuan bisa keluar dalam ruang publik, namun memang prosentase perempuan yang mau keluar dalam ruang publik masih amat kecil.<sup>17</sup>

Ini terkadang menjadi bomerang bagi perempuan sendiri sebab pada kenyataannya perempuan yang menyuarakan emansipasi justru dijerumuskan dalam peran ganda. Sehingga bukannya keadilan dan

---

<sup>15</sup> Ditaria, "Analisis Gender Peran Kepemimpinan Perempuan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tahun 2016". Hal. 6.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>17</sup> Dwi Edi Wibowo, "Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender". *Jurnal Muwazab*. Vol. 3. No. 1. Julis 2011. Hal. 361.

**Ni'matun Naharin:** *Subordinasi Perempuan.....*

pembagian peran yang baik yang diperoleh justru sebaliknya. Dengan peran ganda ini pekerjaan perempuan semakin banyak dan merumitkan diri perempuan sendiri. Oleh karena itu peran ganda ini kadang merupakan bias yang jarang disadari perempuan.

### *Kiprah Perempuan dalam Organisasi*

Merunut pada kiprah perempuan yang mulai merambah dalam dunia organisasi maka Rosabeth Moss Kanter's mengemukakan pendapatnya. Ketimpangan yang terjadi dalam peran gender dalam berbagai organisasi ini menyebabkan perempuan semakin termarginal karena keterbatasannya. Hal ini juga menjadikan laki-laki lebih unggul menurut teori fungsionalis struktural. Sehingga membuat gender lainnya mendapat stigma buruk yaitu perempuan.<sup>18</sup>

Sementara itu menurut Lips, kondisi perempuan dalam suatu organisasi amat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan relasi yang terjalin antara laki-laki dan perempuan masih sering mengalami ketimpangan. Kejadian ini kemudian menimbulkan bias gender lagi yang diulang-ulang dalam hampir semua organisasi.<sup>19</sup>

Pertentangan antar kelas dalam masyarakat, menyebabkan konflik yang menyentuh relasi gender ini dan kesemuanya karena lingkungan budaya. Teori ini kemudian menjadi yang paling tegas melakukan penolakan terhadap semua anggapan bahwa terdapat perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh kondisi biologis. Karl Marx yang mendapat dukungan Friedrich Engels mengemukakan bahwa relasi gender yang selama ini terjadi dalam masyarakat sepenuhnya merupakan rekayasa masyarakat (*by design*). Dalam pandangan penganut teori fungsional struktural yang selalu bercorak ekonomi memberikan penilaian terhadap kedudukan perempuan ini.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Mohammad Zamroni, "Perempuan Dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender". *Jurnal Dakwah*. Vol. XIV, No. 1. Tahun 2013. Hal. 118.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

Teori fungsional struktural ini merupakan salah satu teori yang banyak dikembangkan sosiolog. Pendekatan ini melihat masyarakat terdiri dari suatu sistem yang terdiri dari berbagai sub sistem yang saling mempengaruhi. Namun pendekatan ini juga mengakui adanya berbagai perbedaan dan keragaman dalam suatu tatanan sosial. Sehingga menimbulkan perbedaan struktur, status, serta peran dalam masyarakat sebagai sebuah sistem.<sup>21</sup> Selain itu konstruksi sosiologis melahirkan perbedaan gender yang selanjutnya terbentuklah peran gender.<sup>22</sup>

Dalam sebuah organisasi pasti seringkali terdapat perbedaan yang mencolok sehingga menimbulkan peran yang berbeda. Sebagai dalih ialah agar keharmonisan terwujud dalam sebuah organisasi itu. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh pranata, sistem sosial dan norma yang diberlakukan secara kontinyu. Sehingga pembagian jenis kelamin berdasarkan gender memunculkan fungsional struktural dengan melihat aspek kesejarahan manusia pra industri. Malah kemudian muncul pula pembagian kerja dengan dasar jenis kelamin yang menyebabkan perbedaan kerja antara laki-laki dan perempuan.

Dampak dari pandangan ini ialah munculnya pembagian kerja yang selalu seksis yaitu mendasarkan pada jenis kelamin. Dimana laki-laki berperan dalam wilayah publik sementara perempuan dalam wilayah domestiknya. Jika kita telusuri lebih lanjut akan kita ketahui bahwa laki-laki memiliki ruang yang lebih luas untuk bekerja sedangkan perempuan lebih sempit. Perempuan memiliki ruang yang sangat sempit dimana perempuan hanya dipandang pemenuh hasrat reproduksi (Saja). Misalnya perempuan hanya bertugas untuk memasak, membersihkan rumah, mengurus anak, memelihara pekarangan, dll. Pembagian peran kerja seperti ini (berbasis jenis kelamin) memang meminimalisir konflik namun disisi lain sangat bias.

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 119.

<sup>22</sup> Ahmad Suhendra, "Rekonstruksi Peran dan Hak Perempuan dalam Organisasi Masyarakat Islam". *Jurnal Musawa*. Vol. 11, No. 1 Januari 2012. Hal. 49.

Kondisi ini kemudian membuat prihatin para pemerhati perempuan khususnya dimana nasib perempuan hanya sebatas alat kelaminnya. Padahal perempuan itu mempunyai kodrat lain yang tidak hanya ditentukan dengan jenis kelaminnya saja. Budaya masyarakat memang terlalu jauh memakai ideologi ini sehingga ketimpangan gender dianggap biasa saja. Namun fungsi sosio-biologis telah mencoba menyatukan teori yang beranggapan bahwa faktor biologis dan faktor sosial budaya menyebabkan laki-laki lebih superior. Reproduksi yang dimiliki perempuan dianggap sebagai pemicu hambatan menuju ruang publik. Sangat berbeda dengan laki-laki, perempuan dianggap lebih rumit sebab memiliki sistem reproduksi. Namun teori ini juga membuat jurang pemisah perbedaan yang sangat mendasar bahwa perilaku laki-laki dan perempuan cenderung berbeda.<sup>23</sup>

Pola pikir seperti yang dijelaskan di atas kemudian membuat perbedaan yang sangat mendiskriminasi. Bahwa kemudian posisi perempuan mengalami ketidakadilan dalam beberapa bentuk. Perbedaan gender kemudian melanggengkan kekerasan terhadap perempuan dan itu baik fisik maupun mental. Padahal sebenarnya kekerasan ini muncul juga karena perbedaan gender ini. Kemudian adanya pembagian gender sendirilah yang menyebabkan tersosialisasinya pembagian posisi perempuan. Sehingga menimbulkan anggapan bahwa perempuan harus senantiasa menerima kodratnya.

Posisi rendah perempuan ini juga kemudian diadopsi dalam organisasi yang diikutinya. Peran-peran penting dalam ruang publik kadang kala sulit untuk diperoleh perempuan. Apalagi stigma perempuan yang cenderung mementingkan emosional terlanjur menjadi kitab rujukan banyak kalangan yang kebanyakan memang patriarkis. Sementara anggapan ini kemudian menjadi ideologi yang akhirnya dibawa perempuan. Perempuan menjadi manusia yang tidak memiliki keahlian, sebab mereka ditempatkan pada ruang-ruang domestik. Bahkan lebih

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 120.

parah lagi perempuan mengalami marginalisasi dalam kegiatannya sehari-hari. Perempuan sulit mendapatkan akses dalam ruang publik, kemudian selalu dipersulit jika ingin mengembangkan dirinya. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan bahkan menuju sikap seksis, yang mana memandang rendah perempuan karena jenis kelaminnya.<sup>24</sup>

Marginalisasi merupakan pengucilan terhadap seseorang yang biasanya hal ini memang dialami oleh kaum perempuan. Scott mengemukakan bentuk-bentuk marginalisasi diantaranya ialah, a). Hal ini sebagai proses pengucilan, b). Menggeser posisi perempuan dari bursa pekerjaan, c). Proses segregasi, d). Bahkan ini merupakan proses ketimpangan ekonomi. Kondisi ini benar-benar mengusir posisi perempuan yang seharusnya dapat memperoleh tempat atau keahlian yang lebih baik. Namun seluruh pelosok negeri ini memang seolah sepakat untuk memarginalkan posisi perempuan baik dari sisi ekonomi maupun sosial kulturalnya. Pada akhirnya perempuan akan benar-benar tetap di tempat kubangan kemiskinan sebab tidak ada akses baginya untuk mengembangkan keahliannya.<sup>25</sup>

Bahkan Fakih menyatakan bahwa bentuk marginalisasi kaum perempuan tidak hanya terjadi dalam dunia pekerjaan saja, namun dalam rumah tangga, masyarakat bahkan negara sekalipun. Dalam keluarga terjadi pemisahan peran dan sangat mendiskriminasi perempuan kemudian timbullah kekuatan yang kaku memandang perempuan sebagai manusia lemah. Kemudian dalam ranah organisasi besar perempuan juga mengalami marginalisasi yaitu tidak bisa tampil menjadi pemimpin. Apalagi dalam sebuah partai atau organisasi besar lainnya perempuan selalu menempati nomor sekian untuk mendapatkan posisi penting.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Zamroni, Mohammad. *Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender*. Jurnal Dakwah, Vol. XIV No. 1 Tahun 2013. Hal. 121

<sup>26</sup> *Ibid.* hal. 122.

*Subordinasi Perempuan dalam Organisasi*

Subordinasi merupakan penempatan seseorang pada urutan kedua, sehingga orang ini dianggap tidak pada tingkatan teratas. Dengan stereotip demikian maka orang jenis kedua ini bisa dan dianggap pantas untuk dimarjinalkan. Subordinasi biasanya terjadi pada perempuan, dimana perempuan dianggap sebagai manusia nomor kedua yang telah mendapat label lemah. Perempuan dianggap tidak bisa dijadikan panutan sehingga dirinya harus selalu mengikuti kemauan laki-laki. Akibat daripada subordinasi ialah kemudian perempuan ini menjadi lemah dalam tatanan sosialnya. Bahkan dalam organisasi yang diikuti perempuan cenderung ditampatkan sebagai pelengkap saja. Ironis memang melihat kenyataan bahwa perempuan masih saja dibatasi ruangnya untuk berekspresi.

Jika dikaitkan dalam dunia pendidikan terutama dalam organisasi kemahasiswaan maka perempuan memang sudah mendapatkan tempat untuk ikut serta. Bahkan perempuan memang telah diperbolehkan menjadi ketua suatu organisasi, namun sangat sedikit organisasi yang mau dipimpin oleh perempuan. Hal ini juga sesuai dengan gerakan sosial dimana jika dalam lingkup kampus atau dunia pendidikan hal ini dimanifestasikan dalam organisasi kemahasiswaan.

Kampus merupakan lingkungan yang sangat nyaman bagi tumbuhnya organisasi mahasiswa. Sebagaimana sebelum merdeka, bahkan reformasi tahun 1998 juga pada masa sekarang kampus masih menjadi tempat yang relevan bagi tumbuhnya embrio pergerakan. Berangkat dari sini pula kemudian organisasi mahasiswa mulai tumbuh dan berkembang sebagaimana perkembangan minat dan bakat mahasiswa. Banyak organisasi telah tumbuh seperti unit kegiatan mahasiswa (ukm) olahraga, jurnalistik, kesehatan, karate, radio, pecinta alam dan lain sebagainya.

Ukm inilah yang membuat kampus semakin hidup dan tumbuh sebab mahasiswa membuat berbagai acara. Satu semester saja dapat kita pastikan paling tidak sepuluh ukm pasti mengadakan kegiatan. Dan dari sini tentu akan dibentuk kepanitiaan yang bertugas melaksanakan

kegiatannya. Kepanitiaan ini terdiri atas ketua pelaksana, sekretaris, bendahara dan divisi-divisi yang nantinya diperlukan dalam kelancaran kegiatannya. Kemudian pasti ada pembagian peran dalam kegiatan tersebut antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita melihat biasanya pembagian ini cenderung mendiskriminasi perempuan. Lagi-lagi pasti perempuan hanya dijadikan sekretaris atau bendahara. Perempuan jarang sekali unjuk gigi sebagai ketua pelaksana kegiatan sehingga otomatis kemampuan mereka pun belum benar-benar terasah.

Padahal kita sekarang berada di era emansipasi perempuan sudah banyak disuarakan bahkan dari kaum laki-laki sekalipun. Terlepas dari sentimen terhadap kapabilitas perempuan ini sebenarnya setiap manusia berhak dan bisa untuk memimpin dan seharusnya tidak ada perbedaan yang bisa digunakan untuk memarginalkan salah satunya. Inilah mengapa riset mengenai perempuan yang selalu tersubordinasi dalam kegiatan-kegiatan UKM ini perlu untuk diteliti. Sebagai acuan sejauh mana sivitas akademika memanasifestasikan pengetahuan dan diskursus mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dan, jika masih terdapat ketimpangan kita perlu mempertanyakan kajian yang selama ini sudah ada di dalam kurikulum belajar mahasiswa.

Dari fakta-fakta itulah kemudian penulis membuat hipotesa awal bahwa perempuan dalam organisasi mengalami subordinasi. Hal ini dibuktikan dengan data yang didapat di lapangan bahwa sedikit sekali perempuan yang menjadi ketua penyelenggara sebuah kegiatan. Dalam lingkup kampus perempuan memiliki ruang untuk bisa mengikuti kegiatan apapun sekehendaknya. Namun perempuan tetap saja dibatasi jika sudah berhubungan dengan ruang publik. Misalnya perempuan dalam organisasi hanya dijadikan sekretaris dan kebanyakan organisasi melakukan demikian. Dari hipotesa ini maka akan dibuktikan dengan data hasil rekapitulasi kegiatan organisasi kampus kurun waktu 2015 di kampus IAIN Tulungagung.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menggambarkan hasil penelitiannya ialah metode deskriptif. Hadari Nawawi<sup>27</sup> mengemukakan bahwa metode penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur untuk memecahkan masalah atau kasus yang diteliti dengan cara menggambarkan keadaan atau subjek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya berdasar fakta yang sebenarnya. Penelitian deskriptif ini akan menyajikan data-data yang sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami serta disimpulkan nantinya. Dengan demikian maka akan terdapat kejelasan setelah membaca grafik data yang telah penulis sajikan.

Sementara itu tujuan daripada menggunakan metode ini ialah agar lebih mudah dalam menjelaskan secara sistematis, faktual serta lebih akurat. Selanjutnya penelitian ini akan mengungkapkan bahwa kondisi perempuan pada masa kini masih ter subordinasi. Subordinasi ini nanti akan dibuktikan melalui data-data yang sudah disusun sedemikian rupa. Pembuktiannya ini didapatkan dari data kegiatan selama satu tahun yang telah diadakan organisasi kampus.

Riset mengenai subordinasi perempuan ini menambah data dan asumsi dominasi laki-laki masih membayangi perempuan. Data ini diperoleh dari riset mengenai prosentase perempuan dilibatkan dalam suatu kegiatan organisasi. Bidikannya yaitu berapa banyak perempuan yang dijadikan ketua pelaksana suatu kegiatan dibandingkan dengan laki-laki. Dan kemudian akan disajikan pula data tentang perempuan yang hanya dijadikan sekretaris dalam kegiatan. Kemudian sebaliknya akan disajikan pula posisi laki-laki yang dijadikan ketua pelaksana kegiatan dan sekretaris. Berikut akan disajikan grafik mengenai kondisi organisasi mahasiswa yang sudah dapat diakses.

Grafik pertama ini menggambarkan jumlah ketua pelaksana kegiatan laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan dan ditandai dengan warna oranye. Ini menunjukkan bahwa laki-laki masih unggul

---

<sup>27</sup> Usmawadi, "Petunjuk Praktis Penulisan Karya Ilmiah".



jika dibandingkan dengan perempuan. Prosentase laki-laki mencapai 75,2% sementara perempuan hanya sekitar 24,7%. Sehingga bisa kita pahami bahwa perempuan masih berada jauh di bawah laki-laki yang artinya kepercayaan publik masih sangat rendah terhadap perempuan. Laki-laki masih superior dalam organisasi sehingga dianggap lebih pantas memimpin dibandingkan perempuan. Selanjutnya akan disajikan data mengenai perempuan dan laki-laki yang menduduki jabatan sekretaris dalam suatu kegiatan kampus.

Dari data diagram kedua ini dapat diketahui bahwa prosentase sekretaris yang dijabat oleh perempuan sangat tinggi yaitu mencapai 77,7%. Sementara sekretaris yang dijabat oleh laki-laki hanya mencapai angka 22,3%. Data ini menunjukkan bahwa jabatan sekretaris lebih banyak diterima atau dijabat oleh perempuan. Surat masuk dari berbagai macam organisasi ini menunjukkan ketimpangan pembagian peran yang seharusnya sudah klar dalam kaca mata gender mahasiswa.

Kesenjangan dari data-data ini secara tidak langsung memang menunjukkan fakta bahwa perempuan telah tersubordinasi. Pola yang selalu sama dan anggapan-anggapan bahwa perempuan memang lebih pantas untuk berada di ruang privat masih dilanggengkan. Kondisi demikian secara psikologis juga mempengaruhi pola pikir masyarakat, budaya bahkan diri perempuan sendiri. Laki-laki pun demikian pada umumnya menganggap perempuan belum mampu berada di depan menjadi pemimpin ataupun ketua. Posisi perempuan semakin dilemahkan karena diri perempuan pun tidak menyadari bahwa sedang dimarjinalkan. Kondisi ini begitu sulit untuk dielakkan sebab konstruksi budaya terlanjur membuat hal sedemikian rupa.

Dalam teori kepemimpinan sekalipun pemimpin harus membawa arus perubahan besar untuk mengarahkan organisasinya. Aktivitas dan kerja organisasi sangat ditunjang dan tergantung dengan keberadaan pemimpin. Pemimpin merupakan pribadi yang harus memiliki kecakapan atau kelebihan yang lainnya sehingga dirinya dianggap dapat membawa

organisasinya kepada satu tujuan yang sama.<sup>28</sup> Beberapa ahli juga turut mendefinisikan pemimpin.

Pendapat pertama dikemukakan Cooley<sup>29</sup> bahwa menurutnya pemimpin itu merupakan inti yang harus ada dalam setiap kelompok atau organisasi. Mumford<sup>30</sup> juga mendefinisikan pemimpin sebagai seseorang yang bertugas untuk mengontrol gejala-gejala sosial. Sementara itu Blackmard<sup>31</sup> memandang kepemimpinan sebagai sentralisasi dari sebuah kekuasaan. Kemudian Smith<sup>32</sup> menjabarkan makna pemimpin ini dalam beberapa ciri kepribadian pemimpin yang satu sama lain selalu berhubungan bahkan menjadi pusat dari masing-masing individu. Pendapat Smith yang paling terlihat pada jenis kelamin dan gaya kepemimpinan baik maskulin maupun feminim. 1). Gaya pemimpin yang maskulin ini dapat dijelaskan yaitu lebih bernuansa *power over* yang artinya gaya kepemimpinannya lebih menunjukkan kekuasaan atasan dan bawahan. 2). Gaya pemimpin yang feminim yaitu lebih pada gaya pemimpin yang aktif, dimana ada suatu proses pemimpin memberlakukan dirinya sebagai pengurus untuk orang lain. 3). Pemimpin transaksional yaitu yang akan terjadi apabila seseorang itu mengambil inisiatif untuk saling bertukar barang. 4). Gaya pemimpin transformasional yaitu pemimpin yang menunjukkan kharismanya dan menciptakan visi dan misi yang bisa memotivasi rekan-rekannya.<sup>33</sup>

Dari sini jelas bahwa posisi perempuan seolah-olah telah termarginalkan dengan sendirinya. Bahkan seringkali kita mendengar ucapan, “Ke kamar mandi saja masih minta diantar kok, mana bisa jadi pemimpin?” atau “Perempuan *gak* usah sekolah terlalu tinggi, paling

---

<sup>28</sup> Ditaria, “Analisis Gender Peran Kepemimpinan Perempuan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tahun 2016”. Hal. 7.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.* hal. 8.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.* hal. 9.

nanti juga *ngurus* dapur.”<sup>34</sup> Ini merupakan ungkapan ironis yang akhirnya semakin membua perempuan inferior. Padahal jika perempuan juga mendapatkan hak-haknya maka dirinya bisa bersaing dengan kaum laki-laki secara *fair*. Dikotomi domestik-publik memang keji bahkan melahirkan stigma buruk terhadap perempuan. Perempuan akan semakin terpasung dalam ruang-ruang domestik kendati sudah banyak pergerakan perempuan yang sudah gencar kampanye emansipasi.

Mimpi tentang seorang pemimpin yang memang harusnya laki-laki ini semakin memasung pikiran perempuan sendiri. Dekadensi berpikir ini nyatanya masih saja terjadi bahkan dalam lingkungan akademis. Penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa subjek mengenai pendapat mereka terkait perempuan. Mereka juga kebanyakan menyangsikan kapabilitas perempuan, perempuan masih dianggap inferior sehingga muncul asumsi bahwa mereka tidak bisa memimpin. Kemandekan berpikir ini terjadi dalam organisasi-organisasi kampus yang seharusnya mereka menyuarakan emansipasi.

Isu kesetaraan gender yang diduga kuat sudah mulai melangit nyatanya belum sepenuhnya terlaksana. Kajian yang selama ini dipelajari mahasiswa menguap jika sudah pada taraf pengaplikasian. Mereka yang secara pengetahuan sudah mumpuni untuk pembagian peran dalam gender tidak begitu sepakat jika menjadikannya pedoman hidup. Jadi sampai saat ini kajian kesetaraan gender dalam sivitas akademik kampus hanya sebatas menjadi pengetahuan. Perempuan masih dianggap lemah, manusia urutan kedua dan patut untuk dipimpin bagi kaum laki-laki. Perlu adanya perbaikan dalam pola pikir mahasiswa ini agar ilmu, kajian yang selama ini sudah merasuk dalam pikiran tidak hanya sebatas pengetahuan belaka namun juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>34</sup> Ahmad Suhendra, “Rekonstruksi Peran dan Hak Perempuan dalam Organisasi Masyarakat Islam”. *Jurnal Musaawa*. Vol. 11, No. 1 Januari 2012. Hal. 48.

### C. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa ternyata dalam pendidikan perguruan tinggi setingkat IAIN Tulungagung masih terdapat subordinasi terhadap perempuan. Hal ini bisa dilihat dari hasil diagram yang menunjukkan jumlah ketua pelaksana laki-laki terbukti masih unggul. Laki-laki masih mendominasi posisi dalam ruang publik sedangkan perempuan masih terbilang sedikit yang menempai posisi penting dalam organisasi.

Selain itu perempuan juga paling banyak perempuan hanya ditempatkan sebagai sekretaris dalam suatu kegiatan. Ini menunjukkan dimana kesadaran komunal akan posisi perempuan masih sangat rendah terutama perempuan sendiri. Kebanyakan mereka masih belum mencapai kesadaran diri untuk ikut berkompetisi dengan laki-laki. Sehingga perlu digarisbawahi bahwa pendidikan dan pengetahuan kesetaraan gender selama ini masih dalam taraf pengetahuan saja. Sedangkan dalam implementasinya masih belum terwujud atau jikapun terwujud itu hanya sebagian kecil yang menerapkannya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Salaa, Jeiske. 2015. "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud". Jurnal *Holistik*, Vol. VIII, No. 15.
- Tim PSG STAIN Pekalongan. 2010. "Perempuan dan Produk Hukum yang Menjamin Keadilan dan Kesetaraan Gender". Jurnal *Muwazab*, Vol. 2, No. 2.
- Ditaria, "Analisis Gender Peran Kepemimpinan Perempuan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tahun 2016".
- Karim, Abdul. 2014. "Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan)". Jurnal *Fikrah*. Vol. 2, No. 1.
- Supartinah. 2010. "Partisipasi Perempuan dalam struktur Organisasi Desa (Study Kasus Desa Pakelen, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara)". Jurnal *Dimensia*, Vol. 4, No. 2.
- Wibowo, Dwi Edi. 2011. "Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender". Jurnal *Muwazab*. Vol. 3. No. 1.
- Zamroni, Mohammad. 2013. "Perempuan Dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender". Jurnal *Dakwah*. Vol. XIV, No. 1.
- Suhendra, Ahmad. 2012. "Rekonstruksi Peran dan Hak Perempuan dalam Organisasi Masyarakat Islam". Jurnal *Musawa*. Vol. 11, No. 1.
- Usmawadi, "Petunjuk Praktis Penulisan Karya Ilmiah".

**Ni'matun Naharin:** *Subordinasi Perempuan.....*